

PENGARUH STATUS SOSIAL-EKONOMI TERHADAP ORIENTASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2005 (Studi di Kecamatan Boyolali)

Wahyuning Satriasih¹, Budi Sukardi²

¹²Program Magister Manajemen Bisnis Syariah Pascasarjana UIN Raden Mas Said
Surakarta

wahyuningsatriasih@gmail.com , budi.sukardi@staff.uinsaid.ac.id

Received: 12-06- 2025

Revised: 20-06-2025

Approved: 28-06-2025

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia dimulai pada tahun 2005 dengan mengacu pada UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP RI No. 6 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Orientasi Pemilih masyarakat Kecamatan Boyolali merupakan hal yang layak diperhatikan dalam hubungannya dengan Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang diselenggarakan di Kabupaten Boyolali pada tanggal 27 Juni 2005 yang lalu. Dalam suatu masyarakat terdapat kedudukan sosial yang dinamakan dengan status sosial-ekonomi. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh status sosial-ekonomi terhadap orientasi pemilih dan seberapa besar pengaruh status sosial-ekonomi terhadap orientasi pemilih. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan sampel 96 pemilih di Kecamatan Boyolali. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan penarikan sampel dengan menggunakan rumus Frank Lynch. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik Analisa data dengan regresi sederhana. Sedangkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji (t-test) dan Koefisien Determinasi. Hubungan status sosial-ekonomi terhadap orientasi pemilih sebesar 0,269 dan pengaruh yang ditimbulkan dari status sosial-ekonomi terhadap orientasi pemilih sebesar 7,2 persen, sehingga dapat dikatakan bahwa status sosial ekonomi bukan faktor yang dominan dalam mempengaruhi orientasi pemilih. Orientasi Pemilih Kecamatan Boyolali memiliki kecenderungan orientasi structural, orientasi religi, orientasi material dan finansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan dan pengaruh positif antara status sosial-ekonomi terhadap orientasi pemilih. Saran yang diajukan kepada Masyarakat Boyolali adalah agar menilai kepemimpinan seseorang terutama dalam menilai para calon Kepala Daerah secara rasional, dengan didasarkan pada visi dan misi calon Kepala Daerah serta program kerja yang mereka sampaikan.

Kata Kunci : Status Sosial-Ekonomi, Orientasi Pemilih, Pemilihan Kepala Daerah Langsung

ABSTRACT

Election Direct Regional Heads in Indonesia began in 2005 with referring to Law No. 32 of 2004 concerning Regional Government and PP RI No. 6 of 2005 Concerning Election, Ratification, Appointment, and Dismissal Regional Head and Deputy Regional Head. Orientation Voters public Subdistrict Boyolali is a worthy thing be noticed in the relationship with Election Direct Regional Head held in the Regency Boyolali on June 27, 2005. In one public there is position social which is called with socio-economic status. So that in study This aiming For know whether There is the influence of socio-economic status on orientation voters and how much big the influence of socio-economic status on orientation voters. Type research used is descriptive with sample of 96 voters in the District Boyolali . The sampling technique used in study This is purposive sampling with withdrawal sample with use Frank Lynch's formula. Data collection techniques with use questionnaire, interviews and documentation. Data analysis used is quantitative. Data analysis techniques with regression simple. While testing hypothesis with using the test (t-test) and Coefficient Determination. The relationship between socio-economic status and orientation voters of 0.269 and the resulting influence from socio-economic status to orientation voters by 7.2 percent, so that can it is said that social status economy No dominant factor in influence orientation voters. Orientation Voters Subdistrict Boyolali own trend structural orientation, orientation religion, material and financial orientation. Research results show that There is significant relationship and influence positive between socio-economic status and orientation voters. Suggestions submitted to the Boyolali Community is to assess leadership somebody especially in assess the candidates Regional Heads in general rational, with based on vision and mission candidate Regional Heads and their work programs convey.

Keywords : Socio - Economic Status, Orientation Voters, Elections Direct Regional Head.

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara yang telah diakui kedaulatannya maka sudah selayaknya tugas negara tersebut menata segala kondisi yang menyangkut kesejahteraan warga negara. Dari sekian hal yang dilakukan, salah satunya adalah bidang politik dan pemerintahan. Salah satu cara untuk mengantisipasi politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia yaitu dengan menyelenggarakan Pilkada Langsung (Laia & Kusmanto, 2021). Salah satu kegiatan Pemerintahan yaitu diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah. Sebelum tahun 2005, peraturan yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah adalah UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 39 ayat (1) yaitu : “ Pemilihan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dilaksanakan di dalam rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota DPRD” (DPR RI, 1999). Kemudian pada Pemerintahan Ibu Megawati dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Langsung dengan dasar hukum UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sejak tahun 2005 dasar hukum yang dipakai adalah pada Pasal 24 ayat (5) yang berbunyi “ Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) dipilih dalam satu pasangan daerah secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.” (RI, 2004). Pada masyarakat Indonesia terdapat berbagai status sosial ekonomi yang beragam (Octavianoro, 2016), pemahaman Pendidikan politik yang beragam (Wenny Eka Septina, 2018), isu-isu tentang pencitraan menjelang Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Ritonga, 2024), dan isu untuk pengalihan persepsi masyarakat tentang calon Kepala Daerah yang ada (Romli & Nurlia, 2023), sehingga menjadi perhatian peneliti untuk mengangkat fenomena ini. Pemilihan Kepala Daerah Langsung sebagai upaya menciptakan *Good Governance* dan mewujudkan otonomi daerah (Tommi A. Legowo, 2005). Kesadaran partisipasi politik di beberapa wilayah yang masih rendah membuat peranan Pemilihan Kepala Daerah Langsung belum maksimal dan selalu diupayakan untuk memenuhi standarisasi demokrasi di Indonesia (Rahmawati, 2024).

Penelitian ini mengambil rumusan masalah yaitu apakah status sosial ekonomi berpengaruh terhadap orientasi politik dan seberapa besar status sosial-ekonomi mempengaruhi orientasi politik di Kecamatan Boyolali. Mengingat pada penelitian-penelitian sebelumnya, status sosial ekonomi merupakan faktor penentu kualitas pemilih sesuai dengan latar belakang pekerjaan dan kondisi ekonomi (Brutu et al., 2024). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui adanya hubungan antara status sosial-ekonomi dan orientasi pemilih serta untuk mengetahui seberapa besar status sosial-ekonomi mempengaruhi orientasi politik di Kecamatan Boyolali.

KERANGKA TEORI

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dasar-dasar teori tentang status sosial-ekonomi, orientasi pemilih dan pemilihan kepala daerah. Status Sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Status Sosial-Ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu di dalam struktur sosial masyarakat, pemberian posisi ini disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status. Faktor-faktor di dalam status sosial ekonomi,

diantaranya pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan jenis tempat tinggal memainkan peran yang krusial (Rahmawati, 2024). Perilaku pemilih dalam Pilkada juga dipengaruhi oleh kedudukan sosial di masyarakat. Para pemuda diharapkan mampu menopang demokratisasi dengan partisipasi aktif dan berkualitas pada Pemilihan Daerah Langsung (Arditama & Septina, 2019).

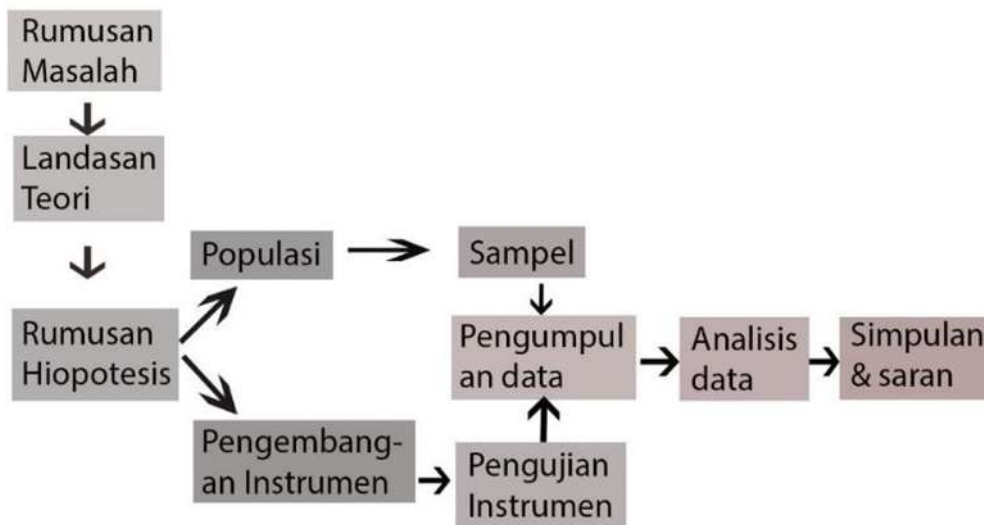
Status sosial-ekonomi berkaitan pula dengan peranan seseorang dalam masyarakat, dimana besar kecilnya peranan tergantung pada kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok orang lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Dalam perspektif birokrasi ada hubungan dengan kekuasaan yang berpengaruh pada partisipasi dan orientasi politik dan pemerintahan (Warganegara et al., 2019). Faktor status sosial-ekonomi ini adalah pembahasan yang tidak terlepas dari pengkajian dalam hubungannya dengan sistem pemerintahan, sebab dalam pemerintahan terdapat pola pengaturan dari pemerintah kepada rakyat. Dalam hal partisipasi politik untuk wilayah kabupaten memiliki pengaruh maksimal sampai pada kategori sedang, dari penelitian yang selama ini dilakukan di Kecamatan Langensari, Kota Banjar (Purnama et al., 2020). Orientasi Pemilih adalah peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat, dsb) yang tepat dan benar atau pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, dan kecenderungan. Orientasi Politik seseorang dibagi menjadi beberapa hal yaitu : orientasi ideologis, orientasi religi, orientasi budaya, orientasi kompetensi, orientasi struktural, orientasi material, orientasi finansial.

Orientasi Pemilih secara konseptual diartikan sebagai peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat dan benar untuk mendapatkan keyakinan secara personal dan /atau institusional yang di dasarkan atas emosi dan pemikiran yang sangat ditentukan oleh faktor kapasitas serta kapabilitas.

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah (Langsung) secara konsep adalah kumpulan unsur yang terbentuk dalam suatu sistem dimana tiap unsur melakukan kegiatan dan Menyusun skema atau tata cara tentang suatu proses untuk memilih Kepala Daerah menurut peraturan institusional. Pemilihan Kepala Daerah langsung untuk mengantisipasi adanya *money politic*, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat peluang tentang hal tersebut (Supriyanti, 2005). Politik uang terjadi karena perbedaan status sosial-ekonomi dan kecenderungan bergesernya keadaan status sosial-ekonomi pada waktu yang berbeda (Laila & Kusmanto, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yaitu dengan menganalisis data berupa angka untuk menggambarkan suatu fenomena hubungan dua variabel, dan deskriptif yang artinya menyatukan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi yang terjadi sekarang dimana peneliti memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk digunakan sebagaimana adanya (Brutu et al., 2024). Bagan penelitian sebagai berikut :



Bagan hubungan antar variabel digambarkan seperti di bawah ini :



Analisa data dengan satu variabel dependent (X) dan satu variabel independent (Y) menggunakan regresi linear atau regresi sederhana(Iii et al., 2017). Rumus Regresi Sederhana :

$$Y = a + bX$$

Dalam penelitian ini, penulis menunjuk pada Populasi masyarakat Kecamatan Boyolali. Dengan pengambilan sampel menggunakan area sampling yang diambil *cluster* di 4 (empat) desa/kalurahan yaitu Kelurahan Pulisen, Kalurahan Siswodipuran, Desa Kiringan, dan Kalurahan Banaran. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Frank Lynch, deangn rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{NZ^2 P (1-P)}{(Nd^2)+(Z (P(1-P)))}$$

Teknik Analisa data menggunakan regresi sederhana antara variable X dan Y, alat yang dipakai adalah SPSS (*Stastistica Package for the Social Solution*). Setelah data valid dan reliabel (*ajeg*) maka dilakukan Teknik korelasi *Product Moment* yang di dalamnya terdapat uji *Koefisien Determinasi (R²)*(James W, Elston D, 20 C.E.), dengan *Uji t-test* atau *uji siginikasi*(James W, Elston D, 20 C.E.). Berikut rumus yang dipakai dalam beberapa teknik di atas.

Rumus Koefisien Korelasi dan Rumus Koefisien Determinasi :

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

- a) Uji r /Koefisiensi Korelasi Product Moment Pearson

Koefisiensi Korelasi merupakan analisis data untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel (X) dan (Y) yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\sum x.y}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

$$r_{xy} = \frac{N \cdot \sum x.y - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2][N \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

b) Rumus Koefisien Determinasi

$$KD = r^2 \times 100$$

Dengan ukuran kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika KD mendeteksi nol (0), maka pengaruh variabel x atau dependent/ bebas adalah lemah
- 2) Jika KD mendeteksi satu (1), maka pengaruh variabel Y atau independent atau terita adalah kuat.

c) Uji Hipotesis menggunakan Uji t (Uji koefisien regresi secara parsial)(Akbar et al., 2024).

Rumus Uji t :

$$t_{hit} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Uji hipotesis ini untuk melihat tingkat signifikansi koefisien regresi, dengan kriteria pengujiannya sebagai berikut :

- 1) H₀ : tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).
- 2) H₁ : terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Pengambilan keputusan dengan kriteria berikut : H₀ : diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

H₁ : ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

PEMBAHASAN

Status sosial-ekonomi memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk mengetahui seberapa tinggi nilai suatu indikator tersebut. Beberapa hasil dari wawancara tentang indikatornya disebutkan dalam artikel ini. Mayoritas responden berkisar antara usia 46 sampai 55 tahun, dengan tingkat Pendidikan tamat SMA/ sederajat memiliki prosentase lebih besar. Pada jenis pekerjaan diperoleh proporsi paling tinggi yaitu 31,25%. Pendapatan dengan skala UMR yaitu 46,88%. Hal ini relevan dengan kondisi

status sosial-ekonomi yang ada pada masyarakat tersebut, mewakili kondisi masyarakat dalam satu wilayah kabupaten.

Orientasi Pemilih di Kabupaten Boyolali mempunyai beberapa kecenderungan yaitu orientasi religi, orientasi budaya, orientasi kompetensi, orientasi struktural, orientasi material, dan orientasi finansial. Karakteristik pemilih juga ada dalam kelompok-kelompok sosial tertentu (Pada & Pandemi, 2025). Dalam penelitian ini ada beberapa yang disampaikan yaitu, orientasi ideologis mengacu pada pemahaman pemilih kepada visi dan misi pasangan calon kepala daerah. Aktivitas pemilih juga berpengaruh pada orientasi pemilih itu sendiri.

Orientasi Religi merupakan pandangan orang terhadap pasangan Kepala Daerah. Meskipun Sebagian besar masyarakat tidak setuju bahwa agama digunakan sebagai simbol politik dan kekuasaan, namun hal ini bisa menjadi dasar seseorang untuk berperilaku politik.

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 96 responden yang berada di Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa responden paling banyak berada pada usia 36-45 yaitu pada usia produktif. Variabel X yang merupakan Status Sosial-Ekonomi menjadi variabel independent, sedangkan variabel Y merupakan Orientasi Pemilih merupakan variabel dependent.

HASIL PELITIAN

Analisis hasil penelitian Pengaruh status sosial-ekonomi terhadap orientasi pemilih di Kabupaten Boyolali tahun 2005 ini ditunjukkan dari hasil kuesioner jawaban dari tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kekayaan, dan jabatan terhadap orientasi pemilih. Yang pertama adalah tingkat pendidikan dengan orientasi pemilih, mendapat hasil kecenderungan bahwa masyarakat yang tergolong mempunyai pendidikan tinggi dan tidak menunjukkan aspek kognisi dan orientasi ideologi mereka.

Orientasi ideologi ini mengacu pada visi dan misi para pasangan calon Kepala Daerah. Yang kedua adalah pekerjaan dengan orientasi pemilih. Dari hasil penelitian kuesioner dan wawancara didapatkan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Boyolali mempunyai pekerjaan tingkat tinggi yang secara struktur dipandang berkedudukan tinggi dalam lingkungan pekerjaannya dan cenderung memiliki orientasi pemilih kurang tinggi, sebab pekerjaan bersifat afektif dan evaluatif bukan cenderung pada kognitif, sehingga tidak memiliki kecenderungan terhadap ideologi atau visi dan misi pasangan calon Kepala Daerah. Hal ini dalam struktur kelembagaan organisasi suatu lingkungan pekerjaan terdapat jenjang dan tingkatan jabatan. Hal yang sama disebutkan pula pada penelitian di wilayah Lampung (Karunia, 2016). Yang ketiga adalah jabatan dengan orientasi pemilih. Mayoritas responden memiliki jabatan kurang tinggi atau pada jabatan pertengahan dan orientasi pemilih kurang tinggi, sebab suatu pekerjaan akan menimbulkan jabatan yang akan menimbulkan status. Orientasi pemilih masyarakat Kecamatan Boyolali yang kurang tinggi menunjukkan adanya kecenderungan orientasi struktural. Yang keempat adalah kekayaan dengan orientasi pemilih. Hasil kuesioner dan wawancara menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki kekayaan kategori kurang tinggi dengan orientasi pemilih kurang tinggi. Pada teori sosiologi disebutkan bahwa pasangan nilai yang sangat penting adalah materialisme dan spiritualisme. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pemilih masyarakat cenderung pada orientasi material, finansial, dan religi.

Hasil penelitian secara keseluruhan status sosial-ekonomi terhadap orientasi pemilih ditunjukkan dalam beberapa hasil uji. Dengan menggunakan alat hitung SPSS (*Statistica Package for the Social Solution*) for Windows Release 12.0, maka diperoleh hasil Koefisien Regresi, Koefisien Determinasi, dan Uji signifikansi.

1. Bahwa setelah dilakukan uji korelasi yang maka diketahui bahwa besarnya hubungan status sosial-ekonomi terhadap orientasi pemilih adalah rendah yaitu 0,269 (berada pada 0,2 sampai 0,399) pada taraf 5 persen dan terdapat hubungan yang signifikan dengan arah positif dan tingkat hubungan rendah.
2. Koefisien Regresi sederhana, status sosial-ekonomi terhadap orientasi pemilih menunjukkan persamaan garis :

$$Y = 46,159 + 0,275 X$$

Artinya : Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa status sosial-ekonomi dan orientasi pemilih adalah pengaruh yang positif ditandai dengan nilai koefisien positif (0,275) yang artinya jika variabel X mengalami kenaikan maka variabel Y juga akan mengalami kenaikan (berbanding lurus/searah). Dengan nilai konstanta menyatakan bahwa tanpa dukungan status sosial-ekonomi (X) maka orientasi pemilih (Y) sebesar 46,159. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih yang tidak menyanggah status sosial-ekonomi dalam masyarakat, maka pemilih masih dapat memilih dalam pencoblosan Pilkada Langsung, secara logika pemilih tersebut tetap bisa memilih dengan memenuhi syarat pemilihan minimal usia 17 tahun.

3. Uji signifikansi (Uji t-test)

Untuk pengujian hipotesa penelitian ini dapat dilihat dari hasil Uji t-test dari variabel status sosial-ekonomi dengan orientasi pemilih 2,81, sedangkan nilai t-tabel dengan alpha 0,05 adalah sebesar 1,984. Dengan hasil penghitungan ini maka terbukti bahwa $t\text{-test} \geq t\text{ table}$ ($2,81 \geq 1,984$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel status sosial-ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap orientasi pemilih.

PENUTUP

Berdasarkan hitungan penghitungan regresi sederhana dengan menggunakan sistem SPSS maka didapatkan ada hubungan antara status sosial-ekonomi terhadap orientasi pemilih., sehingga status sosial-ekonomi terhadap orientasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Boyolali mempunyai pengaruh positif. Orientasi Pemilih masyarakat Kecamatan Boyolali memiliki kecenderungan pada Orientasi Struktural, Orientasi Religi, Orientasi Material, dan Orientasi Finansial. Hal ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kecenderungan orientasi pemilih dalam Pilkada Langsung adalah pada orientasi finansial, struktural, dan material.

Saran yang bisa disampaikan atas hasil penelitian ini adalah, masyarakat hendaknya mengetahui visi dan misi pasangan calon Pemimpin Kepala Daerah sehingga bisa menjadi pemilih yang rasional, tidak hanya cenderung pada orientasi finansial, material, dan struktural. Semoga bisa memacu para peneliti selanjutnya dengan berbagai hasil penelitian terbaru yang bisa menambah keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., Sukmawati, U. S., & Katsirin, K. (2024). Analisis Data Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(3), 430–448.
<https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i3.350>

- Arditama, E. A., & Septina, W. E. (2019). Peran Pemuda Dalam Pilkada Serentak. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 5(2), 80–92. <https://doi.org/10.37058/jipp.v5i2.575>
- Brutu, S., Nainggolan, J. A., Sembiring, G. R., Trisna, W. A., Nainggolan, G., Andini, P., & Prayetno, P. (2024). Analisis Hubungan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Warga Negara (Studi Kasus di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan). *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1), 137–146. <https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1588>
- DPR RI. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999. *Pemerintahan Daerah*, 1–70. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45329/uu-no-22-tahun-1999>
- Farmasi, U. M., Oleh, K. U., & Fatmawati, A. (n.d.). *Pengantar Analisis Regresi Linier Sederhana dalam Penelitian Farmasi*.
- Iii, B. A. B., Jenis, A., Penelitian, P., & Penelitian, L. (2017). *BAB III METODOLOGI PENELITIAN*. *September*, 25–33.
- James W, Elston D, T. J. et al. (20 C.E.). Uji Determinasi. *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology*, 25–34.
- Karunia. (2016). *PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYRAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 (Studi Perbandingan Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)*. 4(June), 2016.
- Laia, M., & Kusmanto, H. (2021). *Pengaruh Politik Uang dan Status Sosial Ekonomi terhadap The Effect of Money Politics and Socio-Economic Status on Public Participation in the 2019 Legislative Elections*. 10(2), 416–423. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4602>
- Octavianoro, Y. B. (2016). *Pengaruh Karakteristik Sosial Ekonomi Dan Persepsi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Terhadap Pilihan Walikota Masyarakat Pilkada Kota Surabaya Tahun 2015*. 5(3), 375–380.
- Pada, B., & Pandemi, M. (2025). *Preferensi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten BAndung Pada Masa Pandemi Covid-19*. 4(1), 19–26.
- Purnama, R., Tiffany, M., & Dewi, F. (2020). *PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI TERHADAP DAERAH PADA MASYARAKAT KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR TAHUN 2018*. 6, 245–256.
- Rahmawati, S. (2024). *Pengaruh Tingkat Status Sosial Ekonomi terhadap Pemahaman Pemilu Pemilih Pemula pada Pilpres 2024 di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat*. 16(2).
- RI, B. (2004). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. *Metallurgical and Materials Transactions A*, 30(8), 2221.
- Ritonga, A. R. (2024). Mengkaji “Blusukan” Sebagai Strategi dan Gaya Komunikasi Dalam Kampanye Politik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 10(1), 83–89.
- Romli, O., & Nurlia, E. (2023). Menimbang Isu Politik Identitas Pada Pilkada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 9(November 2023), 26–38.
- Supriyanti, T. (2005). *UJI SINKRONISASI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG : Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005*.

- Tommi A. Legowo. (2005). Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Good Governance Dan Masa Depan Otonomi Daerah. *Jurnal Desentralisasi*, 6, 1–13.
- Warganegara, A., Hertanto, Maryanah, T., & Kurniawan, R. C. (2019). Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum di Provinsi Lampung. In *International Journal of Humanities and Social Science* (Vol. 2, Issue December).
- Wenny Eka Septina, E. A. (2018). Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam PILGUB Jawa Tengah 2018. *JIPP: Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 04(02), h 130-139.